

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era kontemporer menghadapi tantangan kompleks dalam pencarian model tata kelola pemerintahan yang ideal. Fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta degradasi nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan negara menjadi permasalahan global yang memerlukan solusi komprehensif¹ Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diskursus tentang masyarakat madani (civil society) mengalami kebangkitan signifikan pasca era reformasi 1998² Masyarakat madani yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai konsep "al-mujtama' al-madani" atau "al-ummat al-wasat" memiliki akar historis yang mendalam dalam ajaran Islam, khususnya dalam korpus hadits Nabi Muhammad SAW³

Hadits sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an mengandung nilai-nilai fundamental yang relevan dengan pembentukan masyarakat yang berkeadaban tinggi. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda:

"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"

(Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia)⁴.

Hadits ini menunjukkan bahwa misi fundamental Islam adalah membangun masyarakat beradab dengan moralitas tinggi, yang dalam terminologi modern berkorelasi dengan konsep good governance dan civil society.

Prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits, seperti konsep syura (musyawarah), adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan takaful ijtimai'i

¹ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York: Free Press, 1995), hlm. 25-26

² Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 3-5.

³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 89-92.

⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 2 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1996), hlm. 381, hadits no. 8952

(solidaritas sosial), memiliki kesamaan substantif dengan pilar-pilar governance kontemporer⁵ Sebagai contoh, hadits tentang syura:

"وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ"

(Dan orang-orang yang menerima [seruan] Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka [diputuskan] dengan musyawarah antara mereka)⁶.

Ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang merupakan esensi demokrasi dan good governance⁷

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan akademik yang menarik: bagaimana prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dapat berkontribusi pada pengembangan model governance kontemporer yang lebih inklusif dan berkeadaban? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika kita mengamati bahwa model governance Barat yang dominan selama ini mulai dipertanyakan efektivitasnya, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat⁸

Dalam perspektif teoretis, diskursus tentang masyarakat madani telah menarik perhatian para sarjana Muslim kontemporer seperti Nurcholish Madjid, yang menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan masyarakat modern⁹. Begitu pula dengan Abdolkarim Soroush yang mengembangkan konsep "civil society" dalam kerangka pemikiran Islam¹⁰ Namun, studi komparatif yang komprehensif antara prinsip-prinsip hadits dengan model governance kontemporer masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

⁵ John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 27-31

⁶ QS. Ash-Shura [42]: 38, lihat juga Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 21 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 466-467

⁷ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 162-165

⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Islam and the Challenge of the Modern World* (Kuala Lumpur: Foundation for Traditional Studies, 1994), hlm. 78-82

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 219-225

¹⁰ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 156-159

Kesenjangan akademik yang teridentifikasi adalah minimnya penelitian yang secara sistematis mengkomparasikan prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dengan model governance kontemporer. Studi-studi sebelumnya cenderung memisahkan antara kajian hadits sebagai disiplin ilmu agama dengan studi governance sebagai bagian dari ilmu politik dan administrasi publik¹¹. Padahal, integrasi kedua perspektif ini dapat menghasilkan model governance yang lebih holistik dan sesuai dengan karakter masyarakat Muslim.

Relevansi praktis penelitian ini terlihat dari fenomena global di mana negara-negara Muslim berusaha mencari model governance yang selaras dengan nilai-nilai agama mereka. Sebagai contoh, Malaysia dengan konsep "1Malaysia" dan Turki dengan model neo-Ottomanisme menunjukkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem governance modern¹². Di Indonesia sendiri, wacana masyarakat madani terus menguat, terutama dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan civil society¹³.

Dari perspektif epistemologis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu governance yang tidak hanya berparadigma Barat tetapi juga mengintegrasikan wisdom tradisi Islam. Hal ini sejalan dengan semangat dekolonisasi ilmu pengetahuan yang mulai mendapat perhatian serius di kalangan akademisi¹⁴. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik tetapi juga praktis dalam mengembangkan model governance yang lebih indigenous dan sesuai dengan karakter masyarakat Muslim.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat tantangan global seperti krisis ekologis, ketimpangan sosial, dan degradasi moral yang memerlukan pendekatan governance yang lebih holistik¹⁵. Prinsip-prinsip dalam hadits seperti

¹¹ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 114-118.

¹² John L. Esposito, *The Future of Islam* (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 201-205.

¹³ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 67-71

¹⁴ Syed Farid Alatas, *Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism* (New Delhi: Sage Publications, 2006), hlm. 89-94

¹⁵ UN-Habitat, *The New Urban Agenda* (Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2017), hlm. 15-18

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (tidak boleh menimbulkan mudharat dan saling memudaratkan)¹⁶ dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan governance yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan fenomena, argumentasi teoretis, dan identifikasi kesenjangan di atas, maka permasalahan utama penelitian ini adalah: "Bagaimana prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dapat diintegrasikan dengan model governance kontemporer untuk membentuk masyarakat madani yang ideal?"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi komparatif prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dengan model governance kontemporer dalam konteks pembentukan masyarakat madani dengan mengetengahkan rumusan masalah, antara lain:

1. Apa saja prinsip-prinsip fundamental kemasyarakatan yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pembentukan masyarakat yang beradab?
2. Bagaimana karakteristik dan elemen-elemen utama model governance kontemporer yang menjadi acuan dalam pembentukan good governance dan civil society?
3. Sejauh mana kesamaan dan perbedaan konseptual antara prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dengan elemen-elemen model governance kontemporer?
4. Bagaimana relevansi dan kontribusi prinsip-prinsip hadits dalam memperkaya konsep masyarakat madani kontemporer?
5. Model integratif seperti apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan sinergi antara prinsip-prinsip hadits dengan model governance kontemporer dalam pembentukan masyarakat madani?

¹⁶ Imam Malik, *Al-Muwatta'*, Kitab al-Aqdiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 745, hadits no. 1461

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan prinsip-prinsip fundamental kemasyarakatan yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pembentukan masyarakat yang beradab.
2. Menjelaskan karakteristik dan elemen-elemen utama model governance kontemporer yang menjadi acuan dalam pembentukan good governance dan civil society.
3. Membandingkan dan menganalisis kesamaan dan perbedaan konseptual antara prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dengan elemen-elemen model governance kontemporer.
4. Mengungkap relevansi dan kontribusi prinsip-prinsip hadits dalam memperkaya konsep masyarakat madani kontemporer.
5. Merumuskan model integratif yang mengoptimalkan sinergi antara prinsip-prinsip hadits dengan model governance kontemporer dalam pembentukan masyarakat madani.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *teoretis*, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas khazanah keilmuan, khususnya di bidang Studi Islam, Ilmu Politik, dan Sosiologi, dengan mengembangkan teori integratif yang memadukan prinsip-prinsip hadits dengan konsep governance modern, memperkaya literatur akademik, serta membuka peluang riset lanjutan yang bersifat interdisipliner dan relevan dengan isu-isu kontemporer.
2. Secara *praktis*, penelitian ini menawarkan panduan aplikatif bagi perumus kebijakan, praktisi pemerintahan, dan organisasi masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam desain sistem governance yang responsif dan akuntabel, mendukung reformasi birokrasi, memperkuat peran civil society, serta mengembangkan model

kepemimpinan yang adaptif dan inklusif untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

a. Landasan Epistemologis

Penelitian ini bertumpu pada paradigma integratif-interkonektif yang dikembangkan oleh Amin Abdullah, yang menekankan perlunya mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum¹⁷ Dalam konteks ini, hadits sebagai sumber ajaran Islam tidak dapat dipahami secara isolated dari perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, begitu pula sebaliknya.¹⁸

Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, yang menekankan pada "fusion of horizons" antara teks historis dengan konteks kontemporer. Dalam hal ini, hadits yang berusia lebih dari 14 abad tetap memiliki relevansi dengan permasalahan governance masa kini melalui proses understanding yang dilakukan dengan kesadaran hermeneutik.

b. Teori Masyarakat Madani

Konsep masyarakat madani (civil society) dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, yang mendefinisikannya sebagai masyarakat yang beradab, berkeadaban, dan berkonotasi "kota" sebagai manifestasi peradaban¹⁹ Konsep ini berbeda dengan pengertian civil society Barat yang cenderung sekuler, melainkan merupakan adaptasi dari konsep islami yang mencakup dimensi spiritual dan moral.

Ahmad Baso mengembangkan tipologi civil society dengan tiga karakteristik utama: (1) teritorialitas (civitas), (2) sosiabilitas (socialitas), dan

¹⁷ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 92-96

¹⁸ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, 2nd ed. (New York: Continuum, 1989), hlm. 306-307

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 23-26.

(3) publicness (publicus)²⁰ Dalam konteks Islam, ketiga karakteristik ini dipertegas dengan tambahan dimensi spiritual yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

c. Teori Governance Kontemporer

Kerangka teoretis governance dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan UNDP yang menekankan pada good governance dengan karakteristik: accountability, transparency, rule of law, participation, dan effectiveness²¹ Konsep ini kemudian diperkaya dengan perspektif democratic governance yang dikembangkan oleh UNDP, yang menekankan pada people-centered governance²²

Jan Kooiman mengembangkan teori interactive governance yang menekankan pada jaringan interaksi antara aktor-aktor governance dalam menangani isu-isu kompleks²³. Teori ini sangat relevan dengan konsep syura dalam hadits yang menekankan pada pengambilan keputusan kolektif.

d. Teori Komparatif

Penelitian ini menggunakan comparative method yang dikembangkan oleh Giovanni Sartori, yang menekankan pada analisis similitude (kesamaan) dan difference (perbedaan) antara objek yang dibandingkan²⁴ Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi convergence dan divergence antara prinsip-prinsip hadits dengan model governance kontemporer.

2. Kerangka Konseptual

a. Definisi Operasional

Hadits: Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dengan sanad yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 135-139

²¹ World Bank, *Governance and Development* (Washington D.C.: The World Bank, 1992), hlm. 58-61

²² UNDP, *Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 51-55.

²³ Jan Kooiman, *Governing as Governance* (London: Sage Publications, 2003), hlm. 78-82.

²⁴ Giovanni Sartori, "Concept Misformation in Comparative Politics," *American Political Science Review*, Vol. 64, No. 4 (1970), hlm. 1033-1053

Dalam penelitian ini, fokus pada hadits-hadits shahih yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan²⁵

Prinsip-prinsip Kemasyarakatan dalam Hadits: Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam hadits yang mengatur relasi antar individu dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, meliputi al-Qiyādah (kepemimpinan yang bertanggung jawab), al-'Adālah (keadilan distributif dan prosedural), al-Shūrā (musyawarah dan partisipasi), al-Amānah (transparansi dan akuntabilitas) dan al-Takāful al-Ijtimāī (solidaritas dan kesejahteraan sosial)²⁶

Governance Kontemporer: Sistem pengelolaan urusan publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan bersama²⁷ Mencakup dimensi: institutional, procedural, dan substantial.

Masyarakat Madani: Kondisi sosial yang ditandai dengan adanya civil courage, toleransi, kemampuan untuk berkompromi, penegakan hukum, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual²⁸

b. Konstruk Teoretis

Penelitian ini membangun konstruk teoretis "Islamic-Contemporary Governance Synthesis" yang mengintegrasikan wisdom tradisi Islam dengan inovasi governance modern, didasarkan pada tiga pilar utama yang saling melengkapi dan berinteraksi secara dinamis: Axiological Foundation sebagai sistem nilai yang bersumber dari perpaduan harmonis antara wahyu (revealed values) yang menjadi landasan teologis dan akal (rational values) yang merupakan kontribusi pemikiran manusia; Institutional Framework yang merupakan struktur kelembagaan komprehensif menggabungkan prinsip

²⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Riqaq (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 234

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1995), hlm. 89-94.

²⁷ Rod Rhodes, "The New Governance: Governing without Government," *Political Studies*, Vol. 44, No. 4 (1996), hlm. 652-667

²⁸ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 45-48

syura yang berakar pada tradisi Islam dengan democratic institutions yang telah berkembang dalam praktik governance modern untuk menciptakan sistem pengambilan keputusan yang partisipatif, representatif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; dan Procedural Mechanism yang mengembangkan prosedur governance integratif dengan memadukan metode ishtikhārah sebagai dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan dengan evidence-based policy making yang menekankan pada rasionalitas dan data empiris, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memiliki landasan ilmiah yang kuat tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat Muslim.²⁹

3. Kerangka Analisis

a. Model Analisis Komparatif

Penelitian ini menggunakan model analisis komparatif dengan pendekatan matrix analysis yang secara sistematis dan mendalam membandingkan lima dimensi utama yang saling terkait dan membentuk kerangka analitis holistik, dimulai dari Dimensi Ontologis yang mengeksplorasi hakikat manusia dan masyarakat dalam paradigma Islam dan governance kontemporer untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi dasar tentang realitas sosial dan posisi manusia dalam tatanan kemasyarakatan; dilanjutkan dengan Dimensi Epistemologis yang menganalisis sumber-sumber pengetahuan dan metode pengambilan keputusan dengan membandingkan pendekatan wahyu dan tradisi dalam Islam dengan rasionalitas dan empirisme dalam governance modern; kemudian Dimensi Axiologis yang meneliti sistem nilai fundamental yang mendasari praktik governance untuk memahami prinsip-prinsip etis dan moral yang membentuk kerangka normatif dari kedua paradigma; selanjutnya Dimensi Praksis yang mengkaji implementasi konkret prinsip-prinsip tersebut dalam praktik governance sehari-hari, termasuk mekanisme institusional, prosedur administratif, dan strategi operasional; dan akhirnya Dimensi Teleologis yang

²⁹ Fred N. Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research*, 3rd ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986), hlm. 245-249

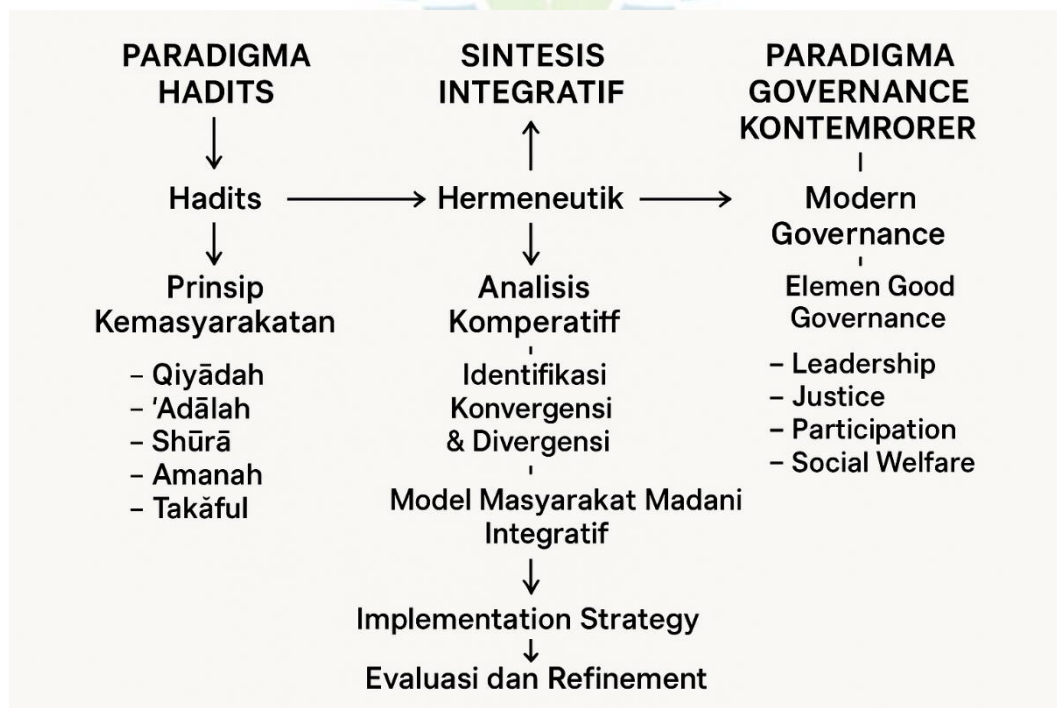
mengidentifikasi dan membandingkan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh kedua paradigma, baik dalam pengertian tujuan duniawi maupun transcendental, untuk menemukan konvergensi potensial dalam visi tentang masyarakat yang ideal dan berkeadilan.³⁰

b. Framework Integrasi

Berdasarkan teori "integration through synthesis" dari Ernst Cassirer³¹ penelitian ini mengembangkan framework integrasi yang terdiri dari Level Konseptual: Harmonisasi konsep-konsep fundamental antara kedua paradigma Level Struktural: Integrasi mekanisme kelembagaan Level Operasional: Sinergi dalam implementasi kebijakan Level Cultural: Akulturasi nilai-nilai dalam praktik sosial.

4. Skema Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah visualisasi kerangka pemikiran penelitian:



³⁰ Fred N. Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research*, 3rd ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986), hlm. 245-249

³¹ Ernst Cassirer, *The Philosophy of Symbolic Forms*, Vol. 3 (New Haven: Yale University Press, 1957), hlm. 213-217.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa studi tentang hadits dan governance kontemporer telah berkembang secara terpisah dalam berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini berusaha mengisi gap dengan melakukan studi komparatif yang komprehensif antara keduanya.

1. Studi Hadits dan Prinsip Kemasyarakatan

Dalam kajian hadits sebagai sumber ajaran Islam, beberapa sarjana telah meneliti dimensi kemasyarakatan. Muhammad al-Ghazali dalam karyanya "Fiqh al-Sīrah" mengidentifikasi prinsip-prinsip governance dalam praktik kepemimpinan Rasulullah SAW, khususnya dalam pengelolaan negara Madinah³² Begitu pula dengan Munir al-Ghadban yang dalam "Manhaj al-Harakat al-Islamiyyah" menekankan pentingnya prinsip syura sebagai foundation governance Islami³³

Taha Jabir al-Alwani mengembangkan konsep "Fiqh al-Awlawiyyat" yang mengintegrasikan hadits dengan kebutuhan kontemporer, meskipun tidak secara spesifik membahas governance modern³⁴. Sementara itu, Ahmad al-Raysuni dalam "Nazariyyat al-Maqasid" memberikan kerangka teoretis untuk memahami hadits dalam konteks tujuan syariah yang lebih luas³⁵

2. Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam

Robert Hefner dalam "Civil Islam" menganalisis perkembangan civil society di Indonesia dengan perspektif Islam, namun kurang mengeksplorasi basis hadits dari konsep ini³⁶. Nurcholish Madjid dalam "Masyarakat Religius"

³² Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 289-295

³³ Munir al-Ghadban, *Manhaj al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Taghyir* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1989), hlm. 145-152.

³⁴ Taha Jabir al-Alwani, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasa fi al-Daninat* (Kairo: Maktabat al-Shuruq, 2003), hlm. 78-85.

³⁵ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam al-Shatibi* (Rabat: Dar al-Aman, 1992), hlm. 112-119.

³⁶ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 45-52

mengembangkan konsep masyarakat madani yang berakar dari tradisi Islam, termasuk hadits, tetapi analisisnya lebih fokus pada aspek teologi³⁷

Azyumardi Azra dalam "Menuju Masyarakat Madani" memberikan sintesis yang lebih komprehensif antara konsep Barat dengan perspektif Islam, meskipun belum secara sistematis menganalisis prinsip-prinsip hadits³⁸. Ahmad Syafii Maarif dalam "Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan" menekankan relevansi values Islam dalam pembangunan civil society³⁹

3. Studi Governance Kontemporer

Literatur governance kontemporer didominasi oleh perspektif Barat. Francis Fukuyama dalam "The End of History" memberikan analisis komprehensif tentang krisis governance modern⁴⁰. James March dan Johan Olsen dalam "Democratic Governance" mengembangkan teori tentang institutional design dalam governance⁴¹

Jan Kooiman dalam "Governing as Governance" memperkenalkan konsep interactive governance yang menekankan pada network dan partnership⁴². Guy Peters dalam "The Future of Governing" menganalisis transformasi peran pemerintah dalam era globalisasi⁴³

4. Studi Komparatif Agama dan Politik

Dalam studi komparatif agama dan politik, Jose Casanova dalam "Public Religions in the Modern World" menganalisis peran agama dalam sphere publik⁴⁴. Alfred Stepan dalam "Arguing Comparative Politics"

³⁷ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 89-96

³⁸ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 67-74.

³⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 234-241

⁴⁰ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992), hlm. 156-163.

⁴¹ James March dan Johan Olsen, *Democratic Governance* (New York: Free Press, 1995), hlm. 201-208.

⁴² Jan Kooiman, *Governing as Governance* (London: Sage Publications, 2003), hlm. 89-96.

⁴³ Guy Peters, *The Future of Governing*, 2nd ed. (Lawrence: University Press of Kansas, 2001), hlm. 145-152.

⁴⁴ Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 178-185

memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara agama dan governance⁴⁵

Abdolkarim Soroush dalam "Reason, Freedom, and Democracy in Islam" mengembangkan framework untuk memahami kompatibilitas Islam dengan demokrasi, meskipun tidak secara khusus membahas hadits⁴⁶ John Esposito dan John Voll dalam "Islam and Democracy" menganalisis various experiences negara-negara Muslim dalam mengadopsi democratic governance⁴⁷

5. Identifikasi Gap penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, teridentifikasi beberapa gap yang akan diisi oleh penelitian ini:

- a. Pertama, minimnya studi komparatif sistematis antara prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dengan model governance kontemporer. Studi-studi sebelumnya cenderung membahas keduanya secara terpisah.
- b. Kedua, kurangnya pendekatan hermeneutik dalam memahami hadits dalam konteks governance kontemporer. Sebagian besar studi hadits masih menggunakan pendekatan tradisional yang kurang responsif terhadap permasalahan modern.
- c. Ketiga, belum adanya framework teoretis yang mengintegrasikan wisdom tradisi Islam dengan innovation governance modern secara komprehensif.
- d. Keempat, minimnya kontribusi perspektif non-Barat dalam pengembangan teori governance kontemporer.
- e. Kelima, kurangnya model implementatif yang dapat diaplikasikan dalam konteks societies Muslim yang menghadapi tantangan modernitas.

6. Kontribusi Spesifik Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan empat kontribusi strategis dan inovatif yang mengisi kesenjangan akademik dalam studi Islam dan

⁴⁵ Alfred Stepan, *Arguing Comparative Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 213-220

⁴⁶ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam* (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 89-96

⁴⁷ John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 67-74

governance: pertama, mengembangkan metodologi komparatif yang unik dengan menggabungkan hermeneutik hadits berdasarkan pendekatan maqasid al-shariah dengan political analysis berbasis critical theory, menciptakan alat analisis yang mampu menjembatani tradisi penafsiran teks keagamaan dengan analisis fenomena politik kontemporer; kedua, menyusun framework teoretis integratif yang komprehensif untuk memahami hubungan dinamis antara nilai-nilai Islam dan tata kelola modern, mengidentifikasi area konvergensi dan divergensi, serta merumuskan model sintesis yang menggabungkan kekuatan keduanya tanpa mengorbankan integritas masing-masing tradisi; ketiga, menghasilkan model praktis yang applicable untuk implementasi prinsip-prinsip hadits dalam konteks governance kontemporer, dilengkapi dengan strategi operasional dan indikator keberhasilan yang dapat diaplikasikan oleh pembuat kebijakan, praktisi governance, dan aktivis civil society; dan keempat, memperkaya teori governance yang selama ini didominasi perspektif Eurosentris dengan menyumbangkan perspektif non-Barat yang autentik dan indigenous, sehingga memposisikan penelitian ini sebagai bridging study strategis yang menghubungkan kesarjanaan Islam klasik dengan ilmu politik kontemporer, menawarkan perspektif segar dalam memahami governance yang lebih inklusif dan komprehensif, serta berkontribusi pada dekolonisasi pengetahuan dalam studi sosial-politik.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memfasilitasi analisis mendalam tentang prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam hadits dan model governance kontemporer melalui pendekatan komparatif yang sistematis. Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretif untuk memahami makna dan relevansi hadits dalam konteks governance modern.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian komparatif-deskriptif. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat data yang berupa teks hadits dan konsep governance yang memerlukan

interpretasi mendalam. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan antara prinsip-prinsip hadits dengan model governance kontemporer.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami makna hadits dalam konteks kontemporer, yang memungkinkan terjadinya "fusion of horizons" antara teks klasik dengan realitas modern. Pendekatan historis-komparatif digunakan untuk memahami evolusi konsep masyarakat madani dan governance sepanjang waktu.

2. Metode Penelitian

Metode utama yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) untuk mengekstraksi prinsip-prinsip kemasyarakatan dari hadits dan elemen-elemen governance kontemporer. Metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi konvergensi dan divergensi antara kedua paradigma.

Metode analisis tematik dipilih untuk mengkategorikan prinsip-prinsip berdasarkan tema-tema utama seperti kepemimpinan, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan kesejahteraan sosial. Metode sintesis teoretis digunakan untuk mengembangkan model integratif yang menggabungkan kedua perspektif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang komprehensif dan bersumber dari berbagai tradisi keilmuan, meliputi teks-teks hadits dalam bahasa Arab asli beserta terjemahannya yang diambil dari kitab-kitab hadits mu'tabar untuk memastikan autentisitas dan validitas sumber primer Islam; literatur governance kontemporer dari berbagai publikasi akademik, dokumen kebijakan organisasi internasional, dan karya-karya teoretis para sarjana governance untuk memberikan landasan konseptual yang kuat tentang perkembangan terkini dalam bidang tata kelola pemerintahan; tafsir dan syarah hadits dari para ulama klasik dan kontemporer yang memberikan kedalaman interpretasi dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks hadits yang dikaji, termasuk karya-karya Ibn Hajar al-Asqalani, al-Nawawi,

dan para mufassirin kontemporer yang mengembangkan pendekatan maqashid dalam memahami hadits; serta studi-studi empiris tentang implementasi prinsip-prinsip governance di berbagai konteks sosial-politik, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, untuk memberikan data faktual tentang tantangan dan peluang dalam menerapkan model governance yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang otoritatif dan komprehensif, berpusat pada Kutub al-Sittah yang merupakan enam koleksi hadits paling terpercaya dalam tradisi Islam, meliputi Sahih Bukhari yang dikenal sebagai kitab paling autentik setelah Al-Qur'an dengan standar periwayatan yang sangat ketat, Sahih Muslim yang memiliki sistematika tematik yang memudahkan penelusuran hadits-hadits terkait prinsip kemasyarakatan, Sunan Abu Dawud yang kaya akan hadits-hadits hukum dan tata kelola, Sunan al-Tirmidhi yang menyajikan berbagai pendapat ulama tentang status hadits, Sunan al-Nasa'i yang terkenal dengan rigoritasnya dalam menyeleksi perawi, dan Sunan Ibn Majah yang melengkapi koleksi dengan hadits-hadits yang tidak terdapat dalam lima kitab sebelumnya; dilengkapi dengan dokumentasi resmi organisasi internasional tentang governance seperti laporan-laporan World Bank tentang Worldwide Governance Indicators, publikasi UNDP mengenai Democratic Governance, dan pedoman OECD tentang Principles of Good Governance yang menyediakan kerangka konseptual dan standar praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan modern; serta wawancara mendalam dengan para pakar hadits yang memiliki otoritas dalam interpretasi teks-teks klasik dan pakar governance yang memahami kompleksitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam konteks kontemporer untuk mendapatkan insights yang tidak tersedia dalam sumber-sumber tertulis.

2) Data Sekunder

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder yang kaya dan beragam, meliputi buku-buku tafsir dan syarah hadits klasik maupun kontemporer seperti Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani yang memberikan penjelasan komprehensif atas Sahih Bukhari, Syarah Nawawi atas Sahih Muslim yang menggabungkan analisis linguistik dan hukum, serta karya-karya kontemporer seperti Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dan tafsir tematik hadits dari Yusuf al-Qaradawi yang menyajikan interpretasi hadits dalam konteks modern; jurnal-jurnal akademik bereputasi tentang governance dan civil society seperti *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, *Journal of Civil Society*, serta *Public Administration Review* yang menyediakan wawasan teoretis dan empiris mutakhir tentang perkembangan konsep dan praktik tata kelola pemerintahan; laporan-laporan penelitian komprehensif tentang implementasi governance dari lembaga-lembaga think tank dan research centers seperti Brookings Institution, International Crisis Group, dan studi-studi evaluatif dari organisasi internasional yang memberikan data faktual tentang keberhasilan dan kegagalan berbagai model governance di berbagai konteks; serta publikasi ilmiah tentang masyarakat madani baik dari perspektif Islam maupun Barat, termasuk karya-karya pemikir Muslim seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, dan sarjana Barat seperti Robert Hefner dan John Esposito yang menganalisis perkembangan konsep masyarakat madani dalam berbagai setting sosial, politik, dan budaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumentasi merupakan teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini, dilaksanakan melalui penelusuran sistematis terhadap hadits-hadits dalam Kutub al-Sittah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan. Proses ini menggunakan pendekatan tematik (*mawduhi*) sebagaimana dikembangkan oleh Muhammad al-Ghazali yang memungkinkan pengorganisasian hadits berdasarkan tema-tema spesifik terkait governance.⁴⁸ Penelusuran juga

⁴⁸ Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1989), hlm. 19-27.

dilakukan terhadap literatur governance kontemporer dari berbagai sumber akademik dan dokumen kebijakan organisasi internasional, dengan fokus khusus pada publikasi World Bank dan UNDP yang menjadi rujukan utama dalam studi governance global.

Analisis dokumen dilakukan dengan pendekatan hermeneutik-komparatif yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap teks hadits dalam konteks historisnya (asbab al-wurud) dan relevansinya dengan realitas kontemporer. Metode ini mengadopsi framework interpretasi yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya memahami maqashid (tujuan) hadits melampaui makna literalnya.⁴⁹ Dokumen governance kontemporer dianalisis menggunakan critical discourse analysis untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi epistemologis yang mendasari konsep-konsep governance dan mengekstraksi prinsip-prinsip fundamentalnya, dengan memperhatikan konteks sosio-politik yang membentuk wacana tersebut.

Wawancara mendalam dilakukan dengan tiga kelompok informan strategis: ulama ahli hadits dari institusi akademik terkemuka seperti Al-Azhar dan UIN yang memiliki otoritas dalam interpretasi teks-teks klasik; akademisi governance dari universitas dan lembaga penelitian yang memiliki publikasi signifikan dalam bidang ini; dan praktisi yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan governance di berbagai tingkatan. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria expertise dan variasi perspektif sebagaimana disarankan oleh Creswell dalam penelitian kualitatif.⁵⁰ Wawancara menggunakan protokol semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi mendalam namun tetap fokus pada tema penelitian.

Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan dengan melibatkan pakar lintas disiplin untuk membahas kemungkinan integrasi prinsip hadits dalam governance modern. Proses ini mengadopsi metodologi deliberative dialogue yang dikembangkan oleh Fishkin, yang memungkinkan pertukaran perspektif secara

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2002), hlm. 111-125.

⁵⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 155-157.

konstruktif untuk menghasilkan sintesis yang lebih komprehensif.⁵¹ FGD dilaksanakan dalam dua sesi utama: pertama berfokus pada identifikasi areas of convergence antara prinsip hadits dan governance kontemporer; kedua mengeksplorasi model aplikatif yang dapat dikembangkan. Hasil FGD didokumentasikan secara terstruktur dan menjadi input penting dalam pengembangan model integratif.

Instrumen penelitian dikembangkan secara sistematis untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif dan terstruktur. Panduan analisis hadits disusun berdasarkan kategori tematik yang relevan dengan aspek-aspek governance, mengadaptasi model penelitian hadits tematik yang dikembangkan oleh Muhammad Syuhudi Ismail.⁵² Matriks komparasi antara prinsip hadits dan governance dirancang dengan parameter yang terukur untuk memfasilitasi analisis sistematis terhadap konvergensi dan divergensi kedua paradigma. Pedoman wawancara terstruktur dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek spesifik yang ingin digali dari masing-masing kelompok informan, sementara framework analisis integratif dirancang untuk memfasilitasi sintesis teoretis dari berbagai sumber data.

Prosedur analisis data dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan unitisasi, yaitu pembagian data menjadi unit-unit analisis berdasarkan relevansi tematisnya dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi terhadap unit-unit data tersebut ke dalam lima kategori utama yang menjadi fokus penelitian: prinsip-prinsip kepemimpinan, konsep keadilan dan pemerataan, mekanisme partisipasi, sistem akuntabilitas, dan model kesejahteraan sosial. Pendekatan ini mengadopsi grounded theory methodology yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin yang memungkinkan konseptualisasi teoretis berbasis data

⁵¹ James S. Fishkin, *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 95-105.

⁵² Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 89-98.

empiris.⁵³ Kategorisasi ini memudahkan identifikasi pola-pola dan relasi antar konsep yang muncul dari data.

Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan konseptual, perbedaan paradigmatis, potensi sinergi, dan area konflik antara prinsip-prinsip hadits dengan model governance kontemporer. Proses ini menggunakan constant comparative method yang memungkinkan perbandingan sistematis antar kategori data. Verifikasi hasil analisis dilakukan melalui triangulasi dengan tiga dimensi: triangulasi sumber yang membandingkan berbagai hadits dan literatur; triangulasi metode yang mengkonfirmasi hasil melalui analisis konten, wawancara, dan FGD; serta triangulasi teori yang menguji temuan dalam berbagai kerangka teoretis. Pendekatan ini mengikuti model validasi data kualitatif yang dikembangkan oleh Norman K. Denzin untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian.⁵⁴

Interpretasi hasil analisis dilakukan dalam kerangka pengembangan model masyarakat madani integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip hadits dengan elemen-elemen governance kontemporer. Proses sintesis mengintegrasikan temuan-temuan penelitian untuk menghasilkan model teoretis baru yang koheren dan komprehensif. Keabsahan data dipastikan melalui empat teknik utama: dependabilitas dengan menggunakan audit trail untuk memastikan konsistensi proses penelitian; konfirmabilitas melalui member checking dengan informan; transferabilitas dengan memberikan thick description untuk memungkinkan aplikasi di konteks lain; dan kredibilitas melalui peer debriefing dengan sesama peneliti. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dalam empat tahap sistematis: persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan, dengan timeline yang jelas dan evaluasi berkala untuk memastikan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana direkomendasikan oleh Maxwell dalam desain penelitian kualitatif.⁵⁵

⁵³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2008), hlm. 159-164.

⁵⁴ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989), hlm. 236-247.

⁵⁵ Joseph A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 214-223.